

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena yang terjadi di Indonesia pada era reformasi sektor publik baru-baru ini ialah tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan. Adanya tuntutan reformasi, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang penyetaraan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut sistem pemerintahan melaksanakan desentralisasi fiskal dan otonomi Daerah.

Reformasi di bidang pengelolaan keuangan ialah dengan diberlakukannya tiga paket peraturan keuangan Negara yang meliputi; UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan Negara. Penetapan Undang-Undang tersebut merubah sistem anggaran tradisional menjadi berbasis kinerja, dan sistem akuntabilitas yang *vertikal* menjadi *horizontal*.

Pelaksanaan desentralisasi diharapkan setiap daerah semakin efisien dan efektif dalam mengatur proses pembagunan karena setiap daerah mendapat wewenang dan kebebasan dalam mengatur kebijakan-kebijakan untuk kemajuan daerahnya. Namun desentralisasi membuka peluang baik eksekutif maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melakukan kecurangan.

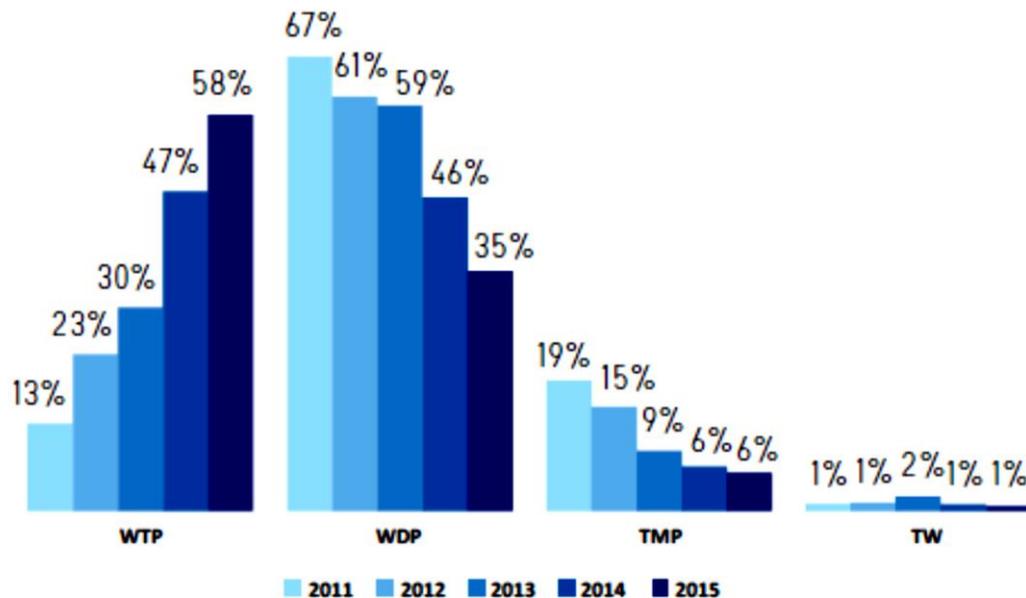
Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah D (2004-2013), sudah 291 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi.

Adanya kecurangan didaerah salah satunya dikarenakan lemahnya pengawasan. Sistem pengawasan terdiri atas pengawasan internal, yaitu pengawasan oleh aparatur melalui pengawasan fungsional serta pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga pengawasan konstitusional, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR. Penilaian terhadap ketepatan pelaksanaan kebijakan organisasi diperlukan adanya peran audit internal supaya organisasi berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (Akhmad, 2014).

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) umumnya memiliki pengendalian internal yang baik. Sedangkan LKPD yang mendapat opini tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP/*disclaimer*) butuh perbaikan pengendalian internal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian internal dan pelaporan, yaitu; pencatatan belum dilakukan secara baik, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum memadai, dan kurangnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten (BPK RI IHPS I, 2016).

Gambar 1.1

## Grafik Perkembangan Opini LKPD 2011-2015



Sumber: BPK RI IHPS I, 2016

Hal penting yang tidak boleh diabaikan terkait kualitas LKPD adalah sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP). SPIP dapat menjadi indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. SPIP ialah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta mempunyai peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) secara dini. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif ialah supaya pelaporan keuangan reliabel (Yosefrinaldi, 2013).

Lambatnya perkembangan kualitas laporan keuangan, maka peningkatan kompetensi SDM dan peran pengawas keuangan serta efektivitas pengendalian internal pemerintah menjadi penting. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan PP No. 60 Tahun 2008, tentang sistem pengendalian internal

pemerintahan. Maksimalnya SPIP diharapkan pengendalian internal semakin efektif sehingga dapat mengatasi permasalahan rendahnya kualitas laporan keuangan (Akhmad, 2014).

Hal yang mendasar lainnya dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan LKPD ialah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). SAKD yaitu prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) yang dilakukan secara manual atau memakai aplikasi komputer.

Melalui peningkatan kompetensi SDM yang dimiliki baik pada tingkatan individu maupun kelembagaan dengan didukung penerapan SAKD yang diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang berujung pada terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) (Dewi dan Yusrawati, 2015).

Adanya komponen seperti SDM yang kompeten, penerapan sistem akuntansi memadai, dan peran audit internal yang profesional, serta dengan didukung pengendalian internal yang baik, maka kualitas informasi laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi akan semakin baik sehingga mencakup sesuai standar akuntansi Pemerintah (SAP) meliputi nilai relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna/pemakai informasi tersebut. Oleh karena itu, keterkaitan faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD sejajar dengan teori kegunaan keputusan (*Decision Usefulness*

*theory*) yang dikemukakan oleh Staubus, bahwa pada informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang harus dipertimbangkan oleh para pembuat informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Teori kegunaan keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna/pemakai berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (Staubus, 2000 dalam Endang, 2011).

Berdasarkan riset sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad (2014) menyatakan, bahwa kompetensi SDM dan peran audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Menurut penelitian Lilis dan Wikan (2014) hasilnya menyatakan bahwa penerapan SAKD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Serta menurut penelitian M. Ali, Biana, dan RR. Sri (2015) hasilnya menyatakan bahwa semua variabel bebas yang digunakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Selain itu, beberapa hasil penelitian yang menjadi acuan dari peneliti pada variabel bebasnya berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas LKPD?
2. Apakah penerapan SAKD berpengaruh terhadap kualitas LKPD?
3. Apakah peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas LKPD?

4. Apakah sistem pengendalian internal Pemerintah memoderasi pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAKD, dan peran audit internal terhadap kualitas LKPD?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis apakah kompetensi SDM, penerapan SAKD, dan peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas LKPD dengan dimoderasi SPIP.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan pengetahuan dan manfaat dalam memahami akuntansi yang berlangsung di Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan baik tidaknya kualitas LKPD.
2. Sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian sejenis dimasa mendatang
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wacana dan referensi yang baik bagi pihak yang memerlukan.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan proses penelitian, maka sistematika penulisannya ialah sebagai berikut:

**Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menggambarkan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, pembahasan hasil penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis serta kerangka pemikiran.

**Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang metode yang berisi penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

**Bab IV : Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data**

Bab ini berisi tentang gambaran subyek dan populasi penelitian serta aspek-aspek dan sampel yang nantinya akan dianalisis. Selain itu bab ini juga berisi tentang analisis data dan pembahasan hasil analisis yang dapat memecahkan masalah.

**Bab V : Kesimpulan**

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian, serta saran atau implikasi dari hasil penelitian